

**PENGARUH PERUBAHAN FUNGSI *PUBLIC SPACE* TERHADAP KAWASAN
DISEKITARNYA
STUDI KASUS TAMAN BANJARSARI SURAKARTA**

Rully

Email : ully_placido@yahoo.co.id

Diterima tanggal : 14 Januari 2017

Abstrak

Sebagai bagian dari rencana tata ruang kedudukan public space akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka, oleh sebab itu public space merupakan elemen penting keberadaannya yang tanpa disadari baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kawasan disekitarnya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari penataan ruang kota perlu ditetapkan keberadaannya secara serius, direncanakan secara menyeluruh dan diperkuat dengan peraturan yang tegas untuk memperjelas status hukumnya.

Latar belakang pemikiran yang digunakan sebagai landasan Penelitian Pengaruh Perubahan Fungsi Public Space terhadap Kawasan disekitarnya dengan study kasus Taman Banjarsari Surakarta didasarkan pada proses, tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan aktifitas di kawasan Taman Banjarsari dari sejak dibangun hingga sekarang.

Dari hasil penelitian diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya perubahan fungsi ruang terbuka publik pasif menjadi ruang terbuka publik aktif pada taman Banjarsari Surakarta terhadap kualitas kawasan di sekitarnya. Dengan demikian pengembangan dan pengelolaannya lebih terarah serta dapat menghindari perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi fungsi lainnya, dan mengupayakan terciptanya Kota Hijau sebagai bagian dari Ruang Terbuka Publik di kawasan perkotaan. Pada proses analisis, terdapat variabel penelitian yang dibangun dari kajian teori, yang dianalisis menggunakan metode kuantitatif rasionalistik. Temuan studi menunjukkan perubahan kualitas kawasan pemukiman di sekitar taman Banjarsari pasca perubahan fungsi dan variabel fungsi taman Banjarsari yang berpengaruh paling signifikan terhadap perubahan tersebut, yang kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan.

Kata kunci : *perubahan fungsi, public space, publik space aktif, publik space pasif, kawasan pemukiman*

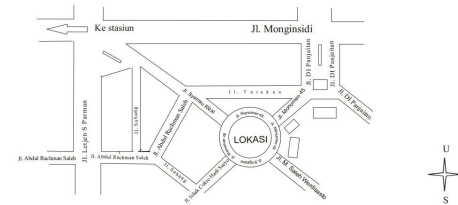
1. PENDAHULUAN

Taman Banjarsari pada awalnya merupakan lapangan untuk latihan berkuda prajurit Mangkunegaran, kemudian pada tanggal 1 April 1975 dibangun Monumen Taman Banjarsari yang terletak di dalamnya, monumen tersebut didirikan dengan tujuan untuk memperingati perjuangan para pejuang

Surakarta yang gugur pada pertempuran empat hari di Surakarta saat mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Monumen tersebut dibangun dengan ukuran lantai 15 X 15 meter, di lahan seluas 17.688 m². Bangunan monumen tersebut juga menggambarkan suatu rangkaian kejadian penting yang menjabarkan perjuangan

rakyat Solo sejak perang kemerdekaan hingga orde baru.

Sejak semula pendirian monumen, kawasan tersebut sudah direncanakan akan dilengkapi bangunan pendukung lainnya, diantaranya museum perjuangan, tempat rekreasi umum, sekaligus difungsikan sebagai *public space*. Taman Banjarsari dilihat dari demografis jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan, merupakan 36 peringkat terakhir di kota Surakarta, dengan luas wilayah 14,81 Km² , jumlah penduduk 162.256.000 dengan kepadatan 10.955/ Km².



Gambar 1.1 Denah lokasi Taman Banjarsari Surakarta

Strategisnya letak taman Banjarsari yang dekat dengan stasiun Balapan, terminal Tirtonadi, pasar Legi dan area pemukiman menjadikan timbul berbagai macam aktifitas baik di dalam taman maupun di kawasan sekitarnya, seiring berjalannya waktu, taman tersebut yang awalnya dibangun untuk tujuan memperingati perjuangan para pejuang Surakarta yang gugur pada pertempuran empat hari di kota Surakarta saat mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda beralih fungsi dari taman kota menjadi tempat pedagang kaki lima, hal ini terjadi pada era pasca krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan kerusuhan Mei tahun 1998 menjadi momentum bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan dengan menjadi pedagang kaki lima disekitar kawasan taman Banjarsari.

Jumlah pedagang kaki lima di taman Banjarsari mengalami peningkatan, menurut pendataan yang dilakukan Tim *City Development Strategy* (CDS) Kota pada waktu itu.



Foto 1.1 Kondisi perubahan fungsi taman Banjarsari sebagai tempat berkumpulnya pedagang kaki lima, sebelum direnovasi pada tahun 2007

Sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 jumlah PKL di taman Banjarsari terus bertambah, kondisi ini mengakibatkan menurunnya kualitas kawasan disekitarnya, menurunnya kualitas kawasan tersebut didasarkan pada wawancara dengan penduduk di kawasan tersebut yang mulai merasa tidak nyaman dalam hal terganggunya privasi, kebisingan dan tidak teraturnya lalu lintas karena muncul tempat parkir liar disekitar taman tersebut.

Perubahan fungsi *public space* taman Banjarsari yang pada awalnya berupa *public space* pasif menjadi *public space* aktif yang tidak dikelola dengan optimal menimbulkan pengaruh negatif bagi kawasan disekitarnya.

Kondisi perubahan fungsi *public space* aktif namun tidak dikelola sesuai dengan fungsi dasarnya mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat pada saat itu, sehingga kawasan tersebut dikembalikan ke fungsi semula sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota Surakarta untuk rekreasi, berolahraga, ataupun melakukan aktivitas sosial lainnya.

Pemerintah kota dalam upaya mengembalikan fungsi semula kawasan Monumen Perjuangan 45' Banjarsari melakukan rehabilitasi dan pembenahan, meliputi renovasi pada *hard material* dan *soft material*



Foto 1.2. Kondisi Monumen 45 Taman Banjarsari setelah direnovasi

2. Landasan Teori

a. Ruang Publik

Ruang publik diartikan sebagai ruang dimana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik, mereka berhak melakukan secara merdeka didalamnya, termasuk mengembangkan wacana publik seperti menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis (A.S. Hikam dalam A.S. Culla,1999:123)

Dengan tersedianya ruang publik yang bebas maka masyarakat madani (*civil society*) akan terbentuk dengan sendirinya. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang memiliki kebebasan individu didalam institusi/assosiasi (dapat dimasuki dan ditinggalkan secara bebas), kelembagaan tidak mendominasi individu (menghargai otonomi individual), ada partisipasi dan ada pelembagaan hak-hak kewarga-negaraan, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi.

Masyarakat madani adalah merupakan wilayah kehidupan sosial yang

terorganisasi dan becirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self enerating*), dan keswadayaan (*self upporting*), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Adapun ciri-ciri mendasar dari masyarakat Madani, antara lain :

- a. Egalitarianisme
- b. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi
- c. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif.
- d. Penegakkan hukum dan keadilan
- e. Toleransi dan pluralisme
- f. Musyawarah

(Nurcholis Madjid dalam A.S. Hikam,1997:122-123).

b. Pertumbuhan Kota

Teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan kota berlangsung secara alamiah antara lain dikemukakan oleh Ernest W. Burgess (1925) dalam *The City*, yang menyumbangkan teori pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat konserntrik (seperti pusat daerah bisnis, daerah transisi, tempat tinggal pekerja, tempat tinggal kelas menengah, dan tempat tinggal para komuter). Teori pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt (1939) dalam *The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in merican Cities*. Dan pola pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat inti-berganda (*multiple-nuclei*) dikemukakan oleh Harris dan Ulman (1945) dalam *Multiple-Nuclei Theory* (teori pusat kegiatan banyak). Ketiga teori di atas menilai pertumbuhan kota berlangsung secara alamiah yang mengikuti pola tertentu (H.S. Yunus,2000:3-61).

c. Perencanaan Kota

Perencanaan kota (*urban planning*) merupakan merencanakan sesuatu lingkungan tertentu, yang lebih luas dari pada perencanaan lahan atau fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan sosial yang mempengaruhi wilayah kota. John R. Mennery (1986) mendefinisikan perencanaan kota sebagai intervensi di dalam proses alokasi sumber daya, khususnya terhadap tanah dan kegiatan-kegiatan di atasnya, dalam sistem aktivitas kota dan regional oleh otoritas publik yang sah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sarana yang sesuai (Minnery dalam A. Nurmandi, 1999:141-142).

d. *Public Space* sebagai Komponen Masyarakat

Di dalam memberikan batasan tentang pengertian Ruang Terbuka, maka ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian ruang. Filosof kenamaan Immanuel Kant dan Plato memberikan rumusan yang baik mengenai hal ini.

Menurut Kant, ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia, sedangkan menurut Plato ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berada (E. Budiharjo dan Dj.Sujarto : 1999)

Pengertian lain tentang ruang seperti tertera di dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Jeluddin Daud, dkk :1996).

Peranan dan fungsi ruang terbuka secara umum adalah :

- Tempat bermain dan berolah raga;
- Tempat bersantai;
- Tempat komunikasi sosial;
- Tempat peralihan, tempat menunggu;
- Tempat mendapatkan udara segar;
- Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain;
- Sebagai pembatas atau jarak diantara massa bangunan.

Fungsi Ekologis :

- Penyegaran udara;
- Menyerap air hujan;
- Pengendalian banjir;
- Memelihara ekosistem tertentu;
- Pelembut arsitektur bangunan

3. PEMBAHASAN

Dasar target dari penelitian ini adalah mempersiapkan rancangan teknis *public space* taman Banjarsari dan kawasan disekitarnya dengan pendekatan pada arahan dan kebutuhan menurut satuan wilayah yang dikaji sehingga dapat mengantisipasi pengaruh negatif berubahnya fungsi *public space* terhadap kawasan disekitarnya. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan *public space* di wilayah perkotaan diawali dengan tindak inventarisasi (ulang) atas *public space* yang terdapat di wilayah tersebut. Inventarisasi dilakukan untuk mencacah sekaligus mengambil data dari *public space* yang dimaksud. Pencacahan *public space* untuk diinventarisasi dipandu beberapa hal. Pertama adalah berdasar batasan teoretik, kemudian diputuskan area yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari *public space*. Namun pada kenyataannya penerapan kaidah teoretik ini kurang efektif, karena orientasi pekerjaan ini lebih ke implementasi praktis, dimana *public space* yang sesuai kaidah teoretik seringkali tidak realistik untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Kedua, adalah dengan mengacu pada arahan rencana tata ruang kota yang

berlaku ataupun bentuk rencana lain yang berkenaan dengan *public space*, pertamanan, dan sejenisnya. Cara ini juga tidak sepenuhnya aplikatif. Dalam banyak kasus *public space* yang ditetapkan dalam rencana tata ruang seringkali pada saat ini masih sangat tidak jelas keberadaannya (alamat/koordinat) khususnya pada area pengembangan perkotaan baru, karena area yang direncanakan saat ini masih berupa lahan pertanian luas. Ketiga, berdasarkan pada petunjuk instansi yang berwenang. Ini merupakan cara yang paling mudah diikuti, dan berorientasi secara jelas pada keterlaksanaan pembangunan.

a. Penggunaan Ruang Terbuka Umum

Di kawasan perkotaan terdapat berbagai fasilitas umum, sebagian diantaranya merupakan ruang terbuka umum yang bebas diakses oleh publik, pada ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang independen dan hak memperoleh informasi yang transparan. Namun begitu cukup banyak juga responden yang menyatakan bahwa mereka merasa ragu dalam ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang independen dan hal memperoleh informasi yang transparan. Bahkan ada juga responden yang menyatakan tidak ada kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang independen serta mendapatkan informasi yang transparan dalam ruang terbuka tersebut. Pada ruang terbuka umum dimungkinkan terjadi keberagaman, keadilan dan toleransi bagi perbedaan warga kota. Keberadaan ruang terbuka umum di Indonesia pada umumnya belum sepenuhnya dapat diakomodir oleh pemerintah. Memang sebagian dari ruang terbuka umum ini sudah disediakan oleh pemerintah namun

jumlahnya masih sedikit dan masih minim perawatannya.

Kurangnya akomodir pemerintah terhadap ruang terbuka umum ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan dan apresiasi bagi keberagaman masyarakat baik ditinjau dari segi kultur, dan kebutuhannya.

b. Partisipasi Masyarakat

Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan menjaga lingkungan khususnya *public space* masih sangat rendah terutama untuk sektor swasta. Paling Tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ada pada sektor sosial. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tersebut juga sejalan dengan rendahnya frekuensi dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan *public space* di Indonesia, masyarakat masih bersifat apatis. Berdasarkan indentifikasi awal sebagian besar responden, tidak ada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan publik space yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta, bukan dikarenakan tidak adanya sarana/media bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Sebetulnya sebagian kota di Indonesia sudah memfasilitasi keterlibatan langsung masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan *public space*.

Pembentukan Masyarakat Madani (*Civil Society*) sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya

public space, Ciri utama dari masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kemandirian secara politik, sosial dan ekonomi atau merupakan masyarakat yang memiliki kebebasan terhadap pengaruh negara dan pengaruh mekanisme pasar. Sifat kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat madani merupakan pencerminan dari ciri civilisasi (peradaban/ keso-panan), penegakan disiplin sosial, moralitas masyarakat, identitas, kohesivitas sosial, otonom dan kemandirian politik, partisipasi sosial, tertib sosial, keadilan sosial serta visi dan misi strategis.

Bila ditinjau dari ciri masyarakat madani yang ideal sebagian masyarakat perkotaan di Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut. Kondisi yang terjadi pada kenyataannya dapat dilihat dari jenis hubungan sosial yang terjalin. Hubungan sosial yang terjalin cenderung hubungan sosial yang negatif, seperti intimidasi, penindasan, kekerasan, teror serta etakutan. Sangat jarang terjadi hubungan positif antara anggota masyarakat yang tercermin dalam sikap saling menghargai, tolong-menolong dan pengertian kebersamaan.

Anggota masyarakat sekarang ini masih kurang patuh terhadap norma dan peraturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan partisipasinya dalam menjaga lingkungan khususnya *public space*.

Sifat individualisme pada masyarakat perkotaan yang masih sangat menonjol juga akan mempengaruhi kurangnya upaya untuk turut berperan serta dalam menjaga lingkungan.

Peran pemerintah masih sangat menonjol dalam hal ini, dimana pemerintah masih sangat dominan

untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat tanpa ikut melibatkan masyarakat itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Dari gambaran awal masalah Pengaruh Perubahan Fungsi *Public Space* terhadap kawasan disekitarnya dengan study kasus Taman Banjarsari Surakarta dapat diungkapkan adanya sejumlah permasalahan umum yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan *public space* lebih lanjut. Permasalahan yang teridentifikasi ini merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap pemetaan keseluruhan *public space* dalam wilayah maupun kajian individual. Permasalahan yang teridentifikasi dapat disebutkan di antaranya adalah:

- 1) Perubahan fungsi *public space* menyebabkan berubahnya kualitas kawasan permukiman di sekitarnya.
- 2) Pengaruh berubahnya fungsi *public space* pasif menjadi *public space* aktif menyebabkan peningkatan intensitas kepadatan sirkulasi lalu lintas, kebisingan, polusi udara dan menurunnya tingkat privasi penghuni di sekitar *public space* tersebut
- 3) Perlu adanya sosialisasi peran *public space* dalam pembangunan ekonomi wilayah, dimana meski tidak memberikan keuntungan finansial, *public space* dapat mengembalikan penyegaran bagi warga kota setelah menjalani kegiatan rutin sehari-hari atau mingguan, sehingga tingkat produktivitasnya dapat terjaga.
- 4) Keberadaan *public space* pada umumnya belum direncanakan secara sengaja.

Dalam banyak kasus, pengadaan *public space* kemungkinan karena memanfaatkan keberadaan ruang terbuka yang tersedia, yang bisa saja berasal dari persil kosong, atau tanah kebun, atau sempadan sungai, dan sejenisnya. Dapat dimaklumi mengingat banyak rencana

pembangunan tata ruang di Indonesia lebih berorientasi pada aspek pengaturan daripada sebagai cetak biru pembangunan yang membentuk kota (*developmental*), sehingga banyak zona kota yang kekurangan pasokan *public space*, dan sebaliknya ada juga yang berlebih. Kalau berlebih pun bentuknya tidak menjawab kebutuhan setempat.

- 5) Kultur pemahaman dan pemaknaan arti dan fungsi *public space* suatu kota bisa berubah karena perubahan tata nilai dan pemaknaan tempat yang bersangkutan sehingga kekuatan pemahaman tentang obyek pada tingkatan desainer sekaligus upaya kreatif yang dilakukannya untuk menghasilkan pewadahan ruang publik kota yang sesuai kultur dan struktur sosial masyarakatnya.
- 6) Keterlibatan pemerintah setempat dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang madani (*Civil Society*) perlu ditingkatkan.
- 7) Dari identifikasi global mengenai peran *public space* pada suatu kota didapatkan fenomena perbedaan pemaknaan melalui wujud desain arsitektural oleh masyarakatnya.
- 8) Wujud desain arsitektural *public space* pada suatu kota akan mempengaruhi tingkatan upaya masyarakatnya dalam menjaga lingkungan binaan kota.
- 9) Semakin strategis letak *public space* di suatu kota akan semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan dan pengaruh serta fungsi *public space* dan kawasan disekitarnya apabila tidak ada aturan tegas yang mendasarinya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 1989. *Laporan Dinas Pertamanan DKI 1988 – 1989*. Dinas Pertamanan DKI Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Depdagri, Ruang Terbuka Hijau Kota. Jakarta, 1990

Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto, 1999, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung.

Budiharjo, Eko, 1984, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Budiharjo, Eko, 1999, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, Andi, Yogyakarta.

Hadi, Hariri, 1987, *Strategi Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional*, Prisma No.1, LP3ES, Jakarta.

Handinoto, (1995). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya : 1870 – 1940*. Andi Press, Yogyakarta.

Hikam, Muhammad As, 1997 *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta

Nurmandi, Ahmad, 1999, *Manajemen Perkotaan, Aktor Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta.

Biodata Penulis,

Rully, S-1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan (1996), S-2 Magister Teknik Arsitektur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2003), Dosen Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta sejak 1998.